BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap individu berhak dan harus selalu menjaga kesehatan yang merupakan modal utama agar dapat hidup produktif, bahagia dan sejahtera. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengartikan kesehatan sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam menciptakan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat, maka diperlukan adanya upaya pembangunan sarana kesehatan yang merata dan terjangkau, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang ditujukan pada masyarakat agar dapat memperbaiki kualitas kesehatan pada masyarakat.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu contoh jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, dijelaskan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek sebagai tempat pelayanan kefarmasian memiliki fungsi sebagai tempat

penyediaan dan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan perbekalan farmasi yang mudah untuk diakses demi meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan fungsinya, pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang Apoteker dan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009). Untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek seorang apoteker wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan untuk Tenaga Teknis Kefarmasian dapat dibuktikan dengan adanya Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Apoteker adalah Sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.

Pelayanan kefarmasian di Apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Oleh karena itu, peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi

langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*), untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016).

Pentingnya peran dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Apotek, maka dari itu diperlukan suatu pengalaman Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), dengan adanya penyelenggaraan PKPA ini mereka dapat memperoleh

keterampilan, pengalaman belajar, ilmu pengetahuan dan kompetensi yang memadai, baik secara teori maupun praktik serta di kemudian hari mampu menjalankan tugas sebagai seorang Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Apotek Anugerah I yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kegiatan PKPA di Apotek Anugerah I Denpasar telah dilaksanakan secara luring pada tanggal 16 April 2024 – 18 Mei 2024. Setelah pelaksanaan kegiatan PKPA Apotek ini, diharapkan para calon Apoteker memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman untuk melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan perundang undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon Apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.

4. Memberikan gambaran secara nyata kepada calon apoteker mengenai permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat dari dilaksanakannya praktik kerja profesi Apoteker di Apotek, yaitu :

1. Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon Apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri calon Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek.